

## **TESIS**

### **TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP WASIAT YANG TELAH DIDAFTARKAN KE DAFTAR PUSAT WASIAT TAPI TIDAK DIDAFTARKAN KE BALAI HARTA PENINGGALAN**



**Disusun Oleh :**

**Anggun Restu Mumpuni**

**NIM : 12218005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2020**

**Halaman Persyaratan Gelar**

**TESIS**

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP WASIAT YANG TELAH  
DIDAFTARKAN KE DAFTAR PUSAT WASIAT TAPI TIDAK  
DIDAFTARKAN KE BALAI HARTA PENINGGALAN**

Diajukan Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Magister  
Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

**Disusun Oleh :**

**Anggun Restu Mumpuni**

**NIM : 12218005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

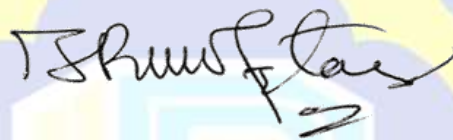
**2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
UNTUK SEMINAR HASIL

Pada Tanggal  
20 FEBRUARI 2020

Pembimbing



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Narotama

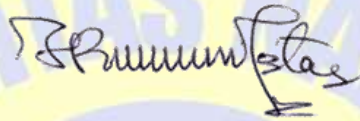


Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Lembar Persetujuan

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI UJI  
PADA TANGGAL **26** FEBRUARI 2020

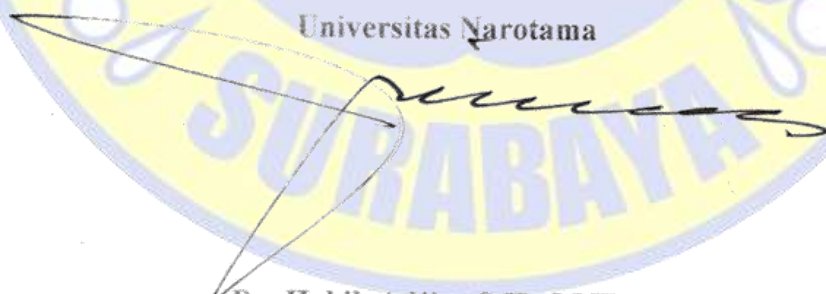
Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Rusdianto Sesung , S.H., M.H.

Mengetahui ,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie , S.H., M.Hum

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada Tanggal ~~28~~ Februari 2020

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.



## TESIS

PADA TANGGAL : 26 Februari 2020

### TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H

Anggota : Dr. RUSDIANTO SESUNG S.H., M.H

: Dr. KHUSNUL YAQIN S.H., M.Hum



.....  
.....  
.....



### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Februari 2020

Surabaya, 24 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



ANGGUN RESTU MUMPUNI  
NIM. 12218005



## **ABSTRAK**

### **Tanggungjawab Notaris Terhadap Wasiat yang Telah Didaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat tapi tidak Didaftarkan ke Balai Harta Peninggalan**

Wasiat tidak hanya didaftarkan dan dilaporkan melalui *online* saja setelah adanya peraturan baru dari kementerian Hukum dan HAM , tapi pendaftaran dan pembukaannya pun masih wajib dilakukan secara manual ke Balai Harta Peninggalan, karena aturan perundang-undangan sendiri masih menerapkan aturan tersebut , dimana dalam hal ini nantinya Notaris akan mendapatkan Akta secara verbal yang diberikan oleh Balai Harta Peninggalan terkait dengan pendaftaran dan pembukaan Surat Wasiat tersebut. Sehingga tidak bisa serta merta notaris membuka surat wasiat tanpa sepengetahuan Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahannya yakni terkait dengan akibat hukum jika wasiat tersebut tidak didaftarkan dan terkait dengan perlindungan hukum penerima wasiat jika wasiatnya tidak didaftarkan di BHP. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan Pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah akta wasiat yang tidak didaftarkan ke BHP akan tetap berbentuk otentik tetapi pada dasarnya akta tersebut tidak dapat dilaksanakan. Notaris yang membuka wasiat tanpa sepengetahuan BHP dianggap telah melakukan pelanggaran secara administratif dan apabila ada pihak yang dirugikan , maka notaris bisa juga digugat secara perdata.

**Kata Kunci:** Notaris , Wasiat , Balai Harta Peninggalan





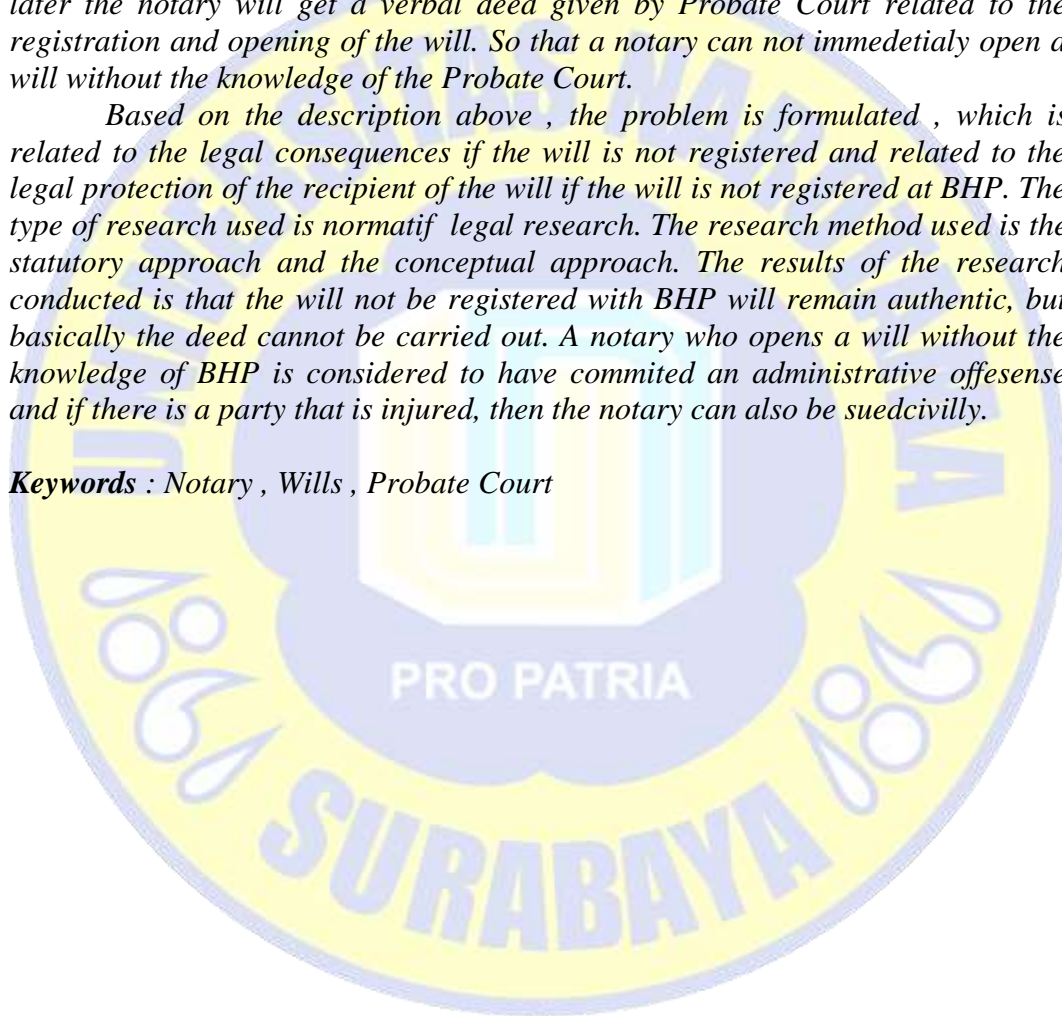
## **Abstract**

### ***Notary responsibility of the will has been registered to the list of the wills but not registered to the inheritance hall***

*The will is not only registered and reported online only after the new regulation from the Ministry of Law and Human Rights , but the registration and opening is still required to be done manually to the Probate Court , because the statutory regulations themselves still apply these rules , which in this case will later the notary will get a verbal deed given by Probate Court related to the registration and opening of the will. So that a notary can not immediately open a will without the knowledge of the Probate Court.*

*Based on the description above , the problem is formulated , which is related to the legal consequences if the will is not registered and related to the legal protection of the recipient of the will if the will is not registered at BHP. The type of research used is normatif legal research. The research method used is the statutory approach and the conceptual approach. The results of the research conducted is that the will not be registered with BHP will remain authentic, but basically the deed cannot be carried out. A notary who opens a will without the knowledge of BHP is considered to have committed an administrative offense and if there is a party that is injured, then the notary can also be sued civilly.*

**Keywords :** Notary , Wills , Probate Court



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pernyataan Gelar .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Tesis .....	iv
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
Ringkasan .....	vii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	5
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
4. Orisinalitas Penelitian .....	7
5. Tinjauan Pustaka .....	12
5.1 Teori tanggungjawab .....	12
5.2 Teori Jabatan Notaris .....	14
5.3 Konsep Wasiat .....	17
6. Metode Penelitian .....	18
6.1 Tipe Penelitian .....	18
6.2 Pendekatan Masalah .....	18
6.3 Sumber Bahan Hukum .....	20
6.3.1 Bahan Hukum Primer .....	20
6.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	20
6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	21
6.5 Analisis Bahan Hukum .....	21
7. Sistematika Penulisan .....	22

## **BAB II : AKIBAT HUKUM DARI AKTA WASIAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI BALAI HARTA PENINGGALAN**

2.1 Pengertian Akta Wasiat .....	24
2.2 Macam-macam Akta Wasiat .....	32
2.3 Pendaftaran Akta Wasiat.....	39
2.4 Tugas Pokok dan Kewenangan Notaris .....	41
2.5 Tanggungjawab Notaris terhadap pendaftaran Akta wasiat ke BHP.....	46
2.6 Akibat Hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan di BHP .....	52

## **BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WASIAT YANG AKTA WASIATNYA TIDAK DIDAFTARKAN DI BALAI HARTA PENINGGALAN**

3.1 Syarat-syarat sebagai Penerima Wasiat .....	69
3.2 Tanggungjawab bagi penerima Wasiat .....	77
3.3 Bentuk Perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang akta Wasiatnya tidak didaftarkan di BHP .....	88

## **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	98
4.2 Saran .....	99

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
-----------------------------	-----



## KESIMPULAN

4.1.1 Akta wasiat yang tidak didaftarkan serta tidak dibukakan oleh Notaris kepada Balai Harta Peninggalan adalah akta wasiat tersebut tetap sah dan berbentuk otentik , tetapi akta wasiat tersebut pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya pendaftaran di BHP. Apabila akta wasiat tersebut tidak didaftarkan dan dilakukan pembukaan oleh Notaris tanpa sepengetahuan BHP , maka notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Apabila setelah dibukakan akta wasiatnya kemudian terdapat kerugian , maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

4.2.2 Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penerima wasiat , maka disini penerima wasiat dapat mengajukan perlindungan hukum secara represif, dimana jika dikaji dari pasal 1365 BW , maka penerima wasiat sebenarnya bisa mengalami kerugian materiil dan imateriil. Dimana , kerugian materiil bisa terjadi jika penerima wasiat nyata-nyata mengalami kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Misal ternyata surat wasiat tersebut telah dibuka dan dilaksanakan oleh notaris tanpa sepengetahuan pihak Balai Harta Peninggalan dan pembacaan serta penyerahannya kepada pihak yang bukan semestinya , maka penerima wasiat akan kehilangan haknya untuk menerima sesuatu yang nilainya bisa dihitung seperti uang dan harta kekayaan. Sementara , dari kerugian imateriil juga bisa terjadi karena jika para penerima wasiat yang dirugikan secara materiil tidak mendapatkan haknya , maka penerima wasiat akan mengalami kerugian berupa kesenangan hidup , Karena seharusnya penerima wasiat sudah bisa menikmati apa yang diwasiatkan terutama yang mempunyai nilai ekonomis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-Empat, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2001

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Benyamin Asri & Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito, Bandung, 1988

E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Balai buku Ichtiar, Djakarta, 1963

GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2004.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

\_\_\_\_\_, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009

\_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 1984

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika Jakarta.. 2009

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

J. Satrio, S.H, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung:, 1992

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Nurhendro Putranto, *Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya*, Balai Harta Peninggalan Surabaya, Surabaya:, 2013

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka setia, Bandung, 1999

Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta, 1986

Ridwan H.R. dalam Rusdianto Sesung et al., *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* Cetakan ke-12, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996

Sarwata, *Notaris Harus Mandiri*, Majalah Triwulan, Jakarta, 2000

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, Refika Aditama, 2006

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989

#### **Thesis :**

Clive Malvin Bayusuta, *Peran Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat ( Testeman ) di Denpasar*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2015.

Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

Mahalia Nola Pohan, "Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatangananannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2011

Mireille Titisari Miarti Prastuti, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang dibuat di hadapannya*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2006.



Mirza Muhammad, *Tanggungjawab notaris dalam pelaksanaan pendaftaran akta wasiat secara online berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Pogram studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya,

Yulaika Ningsih, "Tanggung Gugat dan Tanggung Jawab Notaris Karena Kesalahan Penulisan Luas Tanah Dalam Akta Jual Beli", *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2005), Tidak Dipublikasikan

#### **Jurnal :**

Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, 2000,

Deasy Ratna Sari, "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris", *LamLaj*, Volume 1 Issue 1, 2016

Debora Claudia Panjaitan, "Pembatalan Akta Wasiat sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris (Studi Kasus Putusan MA No. 3124 K/PDT/2013 Antara Penggugat DM vs Tergugat Notaris LSN)", *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, (2016): 9, diakses 17 April 2017, <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/16890/7133>.

Didit Wardio, Lathifah Hanim, "Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018

Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001

Evi Apita Maya, "Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris", *Jurnal IUS*, Vol. 5, No. 2, 2017

Herianto Sinaga, "Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya", *Premise LawJurnal*, Vol. 6, 2015

I Gusti Agung Oka Diatmika, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Ilmiah Prodi MagisterKenotariatan*, 2016-2017

- Julista Mustamu, "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 2, April-Juni 2011
- Leovin Ginho, "Analisis Adanya Praktek Notaris yang Ditetapkan Sebagai Pelanggaran Hukum di Polresta Medan", *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017
- Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan", *Lex Renaissance Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017
- M. Edwin Azhari, Djauhari, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian *Nominee* Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Asing di Lombok", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, Desember 2014.
- Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim, "Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 2, Juni 2017.
- Shabri Saleh Anwar, "Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi dan Agama", *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014,
- Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014,
- Triyanto Setyo Prabowo, "Tanggung Jawab Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Keberhasilan Akta", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017
- Umi Mamlu'ul Hikmah, Bambang Sugiri, Sukarni, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal*, 2016,
- Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2, Januari 2017
- Yopi Rachmad Affandi Pohan, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017

